

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya prinsip *Good Governance*, menuntut bahwa pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Tujuan utamanya adalah agar semua yang dilaporkan baik itu Barang Milik Negara (BMN) maupun Barang Milik Daerah (BMD) bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara keseluruhan dan tepat sesuai tujuan. Namun, pengelolaan aset/barang milik negara atau daerah tidak semudah yang dibayangkan, banyak sekali faktor yang menjadi kendala, antara lain, masih banyak instansi yang belum dapat menyajikan data secara pasti, berapa sesungguhnya nilai aset tersebut.

Di era otonomi sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuan implementasi otonomi daerah antara lain untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Anggaran berbasis kinerja secara struktur meliputi anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.

Penekanan pada belanja daerah menjadi titik perhatian terutama sisi belanja membutuhkan kinerja yang lebih baik, transparan dan tepat sasaran.

Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen penting yang mengundang perhatian publik. Hal itu disebabkan karena masyarakat sebagai pemberi dana publik (*public fund*) melalui pajak daerah yang mereka bayarkan berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan dengan semestinya, efisien, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Belanja daerah tersebut juga mencerminkan kebijakan menghasilkan pendapatan merupakan suatu hal yang lebih sulit dibandingkan membelanjakannya. Karena sifat belanja yang relatif mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya inefisiensi dan kebocoran, maka perencanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap belanja sangat penting dilakukan. Setelah dibelanjakan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, analisis terhadap belanja ini pun mutlak harus dilakukan untuk dijadikan dasar evaluasi, koreksi dan perbaikan ke depan. Kinerja pemerintah sangat penting untuk dilihat dan diukur.

Keberhasilan suatu pemerintahan di era otonomi daerah dapat dilihat dari berbagai ukuran kinerja yang telah dicapainya. Pengelolaan anggaran berdasarkan kinerja ini memberikan gambaran yang lebih khusus terkait dengan kemampuan suatu daerah untuk selalu menggali potensi daerah guna meningkatkan anggaran pendapatan, yang akan berdampak pada kemampuan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah. Kota Malang merupakan salah satu kota yang maju dan berkembang di Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintah daerah oleh PNS Menurut Kurniawan Rudy (2015) Penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS)

daerah sebagai salah satu sub sistem dalam sistem kepegawaian daerah tentu saja memerlukan sarana dan prasarana penunjang demi kelancaran pelaksanaannya. Salah satu cara yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang adil dan merata ke seluruh wilayah adalah sarana transportasi yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah daerah menyediakan mobil dinas sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan perhatian serta kepedulian terhadap kelancaran pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil. Begitu banyak jenis dan versi dari mobil dinas yang di sediakan oleh pemerintah, dari pembahasan diatas tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembayaran yang di lakukan oleh sekretariat daerah kota Malang dalam mencairkan dana untuk pembelian fasilitas pemerintah kota Malang melalui PT.Bank Jatim yang akan di tuangkan dalam sebuah Laporan Tugas Akhir dengan judul: **“Mekanisme pembelian fasilitas Mobil Dinas melalui PT.Bank Jatim sekretariat Daerah Kota Malang Anggaran tahun 2018”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam Laporan Tugas Akhir ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme pembayaran fasilitas mobil dinas di sekretariat kota Malang melalui PT.Bank Jatim kantor kas Malang ?
2. Apa kendala yang di alami bagian keuangan dan perlengkapan sekretariat daerah kota Malang dalam proses pencairan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis menyimpulkan tujuan yang dapat dicapai adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui alur dan persyaratan yang di butuhkan dalam proses pencairan dana dari PT. Bank Jatim kantor kas Malang.
2. Mengetahui kendala yang di alami sekretariat daerah kota Malang dalam mencairkan dana fasilitas mobil dinas di PT. Bank Jatim.

D. Kegunaan Laporan Tugas Akhir

Dari penelitian yang dilakukan, penulis berharap memberikan manfaat bagi:

1. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis khususnya dalam mekanisme pembayaran fasilitas pegawai negeri di sekretariat daerah kota Malang serta sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan pendidikan setara DIII Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Instansi

Diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi segenap pegawai negeri pemerintah Kota Malang khususnya sekretariat daerah kota Malang dalam meningkatkan semangat dan kualitas kerja demi kemajuan kota Malang.

3. Pihak lain

Untuk masyarakat akademik yang akan melakukan penelitian sesudah ini agar dapat di jadikan bahan referensi berkenaan dengan masalah ini.

